

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut akan dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berkecakupan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan merupakan alat dari pembangunan.

Salah satu faktor keberhasilan pembangunan yaitu keberhasilan manusianya. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan, sebab tanpa sumber daya yang

berkualitas, sulit untuk mewujudkan cita-cita yang diharapkan dalam pembangunan Negeri ini.¹

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Saat ini, peranan SDM lebih menonjol dibandingkan modal fisik dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi keluarga. Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Keberhasilan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung pada kualitas SDM, khususnya kompetensi.² Secara

¹Imam Hardjanto, *Teori pembangunan* (Malang: UB Press, 2011), 109.

²Ernadi Syaodih, *Manajemen pembangunan kabupaten dan kota* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 65.

keseluruhan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) provinsi Banten menurut Kabupaten dan kota selama periode 2010-2015 menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini yang penulis peroleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Banten.

Tabel 1.1

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Provinsi Banten**

Kabupaten/ Kota	indeks pembangunan manusia menurut (IPM) kabupaten/kota provinsi Banten 2010-2015					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	59.08	59.92	60.48	61.35	62.06	62.72
Kabupaten Lebak	58.83	59.82	60.22	61.13	61.64	62.03
Kabupaten Tangerang	68.01	68.45	68.83	69.28	69.57	70.05
Kabupaten Serang	60.96	61.97	62.97	63.57	63.97	64.61

Sumber: Badan pusat Statistik Provinsi banten, Diolah.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota
Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia menurut (IPM) kabupaten/kota provinsi Banten 2010-2015					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Tangerang	73.69	74.15	74.57	75.04	75.87	76.08
Kota Cilegon	68.8	69.26	70.07	70.99	71.57	71.81
Kota Serang	68.25	68.69	69.43	69.69	70.26	70.51
Kota Tangerang Selatan	75.38	6.99	77.68	78.65	79.17	79.38

Sumber: Badan pusat Statistik Provinsi banten, Diolah.

Secara umum, pembangunan manusia provinsi Banten selama periode 2010-2015, sesungguhnya secara konsisten selalau meningkat. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatannya sejak tahun 2013 terus mengalami perlambatan. Selama periode tersebut, IPM Banten telah meningkat dari 67,54 menjadi 70,27. Sedangkan kecepatannya melambat dari 1,01 persen menjadi 0,55 persen. Meskipun demikian, IPM Banten telah menunjukkan kemajuan yang cukup besar, karena status pembangunan manusianya meningkat sedang ($60 < IPM < 70$) menjadi tinggi ($70 < IPM < 80$).

Adapun yang menyebabkan IPM di Banten terjadi pada seluruh komponen yakni bayi yang baru lahir pada tahun 2015 memiliki peluang hidup hingga 60,43 tahun, meningkat 0,30 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, peluang anak-anak usia 7 tahun untuk bersekolah juga meningkat dari 12,31 tahun menjadi 12,35 tahun. Lalu, penduduk usia 25 tahun keatas, secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,27 tahun, meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2014. Lalu, pengeluaran perkapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 11,26 juta rupiah pada tahun 2015, meningkat 111 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.³

Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan sebagai pendapatan perkapita diyakini mendorong kemakmuran ekonomi yang lebih besar. Setiap orang diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan dan mencukupi setiap keinginan tanpa adanya penggunaan kekuatan untuk bertarung. Peningkatan kesejahteraan secara empiris terkait dengan semakin tingginya standar hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Sebaliknya, tanpa

³ “Indeks Pembangunan Manusia,” Serang, 10 Maret., 2018.
<https://titiknol.co.id/>

pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi akan mengalami stagnasi , sehingga negara tidak lagi mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi warga negaranya.⁴

Paradigma tradisional memiliki pandangan tentang pembangunan di Negara sedang berkembang (NSB) yang diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita atau sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan ditingkatkannya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat dipecahkan dengan apa yang dikenal *trickle down effect* (merembas kebawah). Disini sebagai indikator berhasil atau tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional bruto (GNP) perkapita riil, dalam arti tingkat pertumbuhan GNP dalam harga konstan (setelah di deflasi dengan indeks harga) harus lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan penduduk.⁵

⁴ A.B Susanto dkk, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 102.

⁵Subandi, *Ekonomi pembangunan* (Bandung: alfabeta,2012), 19.

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam mengelola atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah bersangkutan.⁶

Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan ekonominya setelah pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah yang bersangkutan, serta untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Seperti yang dijelaskan pada Tabel 1.3 mengenai

⁶Yozi Aulia Rahman dan ayunda Lintang Chamelia, *Journal of economy and policy*, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012, Vol.8, No.1,2015.

PDRB Kabupaten / Kota di provinsi Banten atas dasar harga konstan tahun 2000 selama periode tahun 2010-2015 berikut:

Tabel 1.3

PDRB ADHK menurut kabupaten/kota provinsi Banten

Kabupaten /Kota	PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	12 279 541.58	12 984 402.49	13 738 882.22	14 387 883.39	15 097 104.74	15 996 631.86
Kab Lebak	12 572 538.49	13 325 628.83	14 006 208.92	14 887 984.22	15 756 246.97	16 670 889.38
Kabupaten Tangerang	58 099 418.94	62 022 491.45	65 848 281.34	70 065 983.24	73 828 384.71	77 782 306.59
Kab Serang	33 840 990.22	35 905 342.55	37 849 643.03	40 136 684.29	42 300 934.77	44 425 318.51
Kota Tangerang	66 921 378.13	71 864 142.19	76 945 925.61	81 965 314.58	86 183 522.76	90 811 414.30
Kota Cilegon	44 676 528.71	47 633 317.63	51 300 205.69	54 732 934.32	57 261 922.79	59 996 736.87
Kota Serang	12 549 572.23	13 595 691.03	14 604 636.95	15 670 783.99	16 745 083.89	17 799 006.49
Kota Tangerang Selatan	30 525 314.92	33 214 822.74	36 091 808.68	39 251 537.48	42 411 467.14	45 465 202.69

Sumber: Badan pusat statistik provinsi Banten

Perhitungan PDRB telah menjadi bagian yang sangat penting dalam makro ekonomi, khususnya tentang analisis perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan

sebuah peluang.⁷ Ekonomi yang tumbuh akan tercipta banyak peluang. Kemampuan menangkap peluang inilah yang tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Disinilah pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan tidak selalu dari sisi kemajuan fisik, tetapi juga harus diikuti kemajuan non fisik, yakni pelaku pembangunan itu sendiri. Kegiatan perekonomian yang kian besar dan maju ini harus pula ditopang oleh kualitas penduduknya terutama generasi muda yang kian produktif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengatasi masalah pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami banyak negara. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana pembangunan ekonomi masyarakat selalu dikatakan dengan tujuan untuk menurunkan angka pengangguran.⁸ Luasnya pengangguran mencerminkan baik buruknya perekonomian. Indeks yang dipakai adalah tingkat pengangguran yang merupakan persentase jumlah orang yang

⁷Aunur Rofiq, *Kemajuan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2013), 58.

⁸Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: ghalia Indonesia, 2003), 135.

sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah orang yang menawarkan tenaga kerjanya.⁹

Dengan pemanfaatan tenaga kerja, yang dimaksud dengan penganggur adalah orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Batasan menganggur seperti ini juga disebut dengan menganggur terbuka.¹⁰ Berdasarkan definisi ini tingkat pengangguran di provinsi Banten menurut kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota
provinsi Banten

Kabupaten /Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	11.34	11.32	9.3	12.34	7.03	10.22
Kab Lebak	13.35	12.1	9.07	7.23	9.57	10.74

Sumber: Badan Pusat Statitik Provinsi Banten, Diolah

⁹Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*,134.

¹⁰Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1997), 76.

Tabel 1.5
Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota
provinsi Banten

Kabupaten /Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Tangerang	14.01	14.42	11.46	11.94	8.45	9.00
Kab Serang	16.19	13.29	12.96	13.69	14.76	14.80
Kota Tangerang	14.09	12.89	8.31	8.62	7.81	8.00
Kota Cilegon	19.84	13.14	11.31	7.16	11.83	12.00
Kota Serang	17.11	13.84	10.8	11.29	10.03	9.49
Kota Tangerang Selatan	8.22	11.98	8.07	4.56	6.92	6.13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbanyak di provinsi banten berada di kota Cilegon pada tahun 2010 yaitu sebanyak 19,84 persen dan yang paling sedikit jumlah pengangguran berada di kota tangerang selatan yaitu sebanyak 4,56 persen pada tahun 2013. Terjadi penurunan jumlah pengangguran pada kabupaten lebak, kabupaten serang, dan kota cilegon, dan untuk kab/kota lainnya terjadi fluktuasi pada jumlah pengangguran di provinsi banten tahun 2010-2015. Keadaan

tingkat pengangguran yang tinggi pada kabupaten Cilegon disebabkan karena kabupaten ini merupakan kawasan industri yang notabene memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang sedikit.

Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, akan tetapi juga beroleh penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah diliput dalam suatu konsep terpadu mengenai pendapatan dan belanja negara. Pengeluaran-pengeluaran pemerintah bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari akan tetapi juga untuk membiayai perekonomian.¹¹ Di negara manapun selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada satu perekonomianpun termasuk dinegara kapitalis atau negara maju bebas dari intervensi pemerintahannya.

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk

¹¹Dumairy, *Perekonomian Indonesia* , 157.

pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk, ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia. Faktor tersebut merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpu pada swasta terlebih pasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Dengan meningkatnya pendidikan maka akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia (IPM) juga akan mengalami kemajuan. Peningkatan tersebut di dorong oleh adanya peran pemerintah dalam melakukan pengeluaran untuk sektor akses masyarakat dalam memenuhi pendidikan.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*).

Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan. Faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Tabel 1.6

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan

Kab/kota	Tahun Dalam Rupiah					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	382.486	407.738	428.621	443.569	489.675	522.238
Kabupaten Lebak	678.885,59	758.624,38	873.322	1.016.579,32	1.162.285,90	1.284.032,89
Kabupaten Tangerang	1.294.510,48	1.468.292,01	1.666.339,98	1.849.418,30	2.118.719,82	2.388.963,03
Kabupaten Serang	1.294.510,48	1.468.292,01	1.666.339,98	1.849.418,30	2.118.719,82	2.388.963,03

Sumber: Badan Pusat statistik, diolah

Tabel 1.7**Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan**

Kab/kota	Tahun Dalam Rupiah					
Kota Tangerang	1.454. 702,94	1.654. 826,24	1.851. 406,01	2.048. 775,02	2.348. 907,26	2.574. 549,67
Kota Cilegon	299. 919,95	334. 503,48	382. 979,49	419. 180,85	485. 130,49	559. 215,85
Kota Serang	510. 798,16	559. 706,93	641. 377,02	728. 642,77	823. 700,08	918. 383,87
Kota Tangsel	2.474. 602,22	2.474. 602,22	3.200. 348,52	3.682. 693,87	4.162. 829,60	4.717. 892,45

Sumber: Badan Pusat statistik, diolah

Masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang dalam membangun perekonomian mereka salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan dimana masyarakat dengan tingkat ekonominya masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat daerah. Dengan demikian pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan

masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.

Pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) yang merupakan strategi pemerintah yang cukup penting untuk kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dibutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut.

Tabel 1.8

Persentase penduduk miskin

Kabupaten/ Kota	Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Pandeglang	11.14	9.8	9.28	10.25	9.5	10.43
Kab Lebak	10.38	9.2	8.63	9.5	9.17	9.97
Kab Tangerang	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26	5.71
Kab Serang	6.34	5.63	5.28	5.02	4.87	5.09
Kota Tangerang	6.88	6.14	5.56	5.26	4.91	5.04
Kota Cilegon	4.46	3.98	3.82	3.99	3.81	4.1
Kota Serang	7.03	6.25	5.7	5.92	5.7	6.28
Kota Tangerang Selatan	1.67	1.5	1.33	1.75	1.68	1.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Secara garis besar penyebab jumlah penduduk miskin di Banten meningkat disebabkan komoditi makanan dan non makanan. Pada tahun 2015, enam komoditi makanan terbesar yaitu, padi-padian sebesar 13,14 persen, ikan sebesar 6,23 persen, rokok sebanyak 13,79 persen, telur ayam sebanyak 6,46 persen, daging ayam sebesar 4,98 persen dan terakhir makanan dan minuman jadi sebesar 31,49 persen.¹²

Dari komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar untuk garis kemiskinan baik diperkotaan maupun pedesaan adalah biaya perumahan, sebesar 52,17 persen, aneka barang dan jasa sebesar 26,38 persen.¹³

Dari penjelasan yang telah penulis jabarkan di atas, penulis ingin mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti tahun 2013 tentang pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011.

¹²Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2016*(Banten: CV Dharma putra, 2016),419.

¹³Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2016* , 420.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Nur Baeti tahun 2013 tentang pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011, berikut perbedaannya yang sekaligus menjadi kontribusi dalam penelitian ini.

a. Variabel

Penelitian terdahulu terdiri dari 3 variabel Independen yaitu variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 1 variabel yaitu kemiskinan

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah di Provinsi Jawa tengah sedangkan pada penelitian ini adalah di Provinsi Banten menurut Kabupaten/Kota.

c. Periode

Pada penelitian terdahulu periode yang digunakan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2007-2011. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2010-2015.

Oleh karena itu, maka penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan provinsi Banten.
2. Ditinjau dari rencana pembangunan sumber daya manusia, struktur lapangan kerja masih berada

disektor pertanian dengan pendidikan dan ketrampilan yang rendah, sehingga produktifitas kerjanya juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi diberbagai tingkat pembangunan belum dapat secara langsung menciptakan lapangan kerja.

3. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan
4. Lebih dari 50% struktur perekonomian provinsi Banten saat ini bertumpu pada sektor industri dan jasa. Dilain pihak, kemampuan masyarakat secara keseluruhan belum mendukung untuk dikerahkan dalam kegiatan usaha industri dan jasa yang menuntut keahlian dan profesionalisme kerja.
5. Ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga mengakibatkan kemiskinan
6. Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 secara agregat mengalami penurunan. Namun,

jika dilihat disetiap kabupaten/kota tingkat kemiskinannya cukup tinggi dan rangnya berbeda jauh.

C. Batasan Masalah

Dalam menghindari peluasan subjek serta objek penelitian, maka perlu untuk dibuat suatu pembatasan masalah. Tujuannya adalah untuk membatasi arah dan peluasan yang terjadi di dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk variabel dependen atau terikat adalah Indeks pembangunan Manusia. Dan untuk variabel independennya adalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan provinsi Banten menurut kabupaten/kota tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan berpengaruh terhadap IPM?
2. Seberapa besar pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap IPM?

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap IPM
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan terhadap IPM

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu serta wawasan mengenai pengaruh hubungan yang ditimbulkan oleh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Manfaat lainnya yang ingin penulis peroleh adalah kesempatan untuk membahas segala teori yang di dapat selama perkuliahan ke dalam penelitian ini dan mampu untuk menerapkannya di dunia ekonomi bisnis dan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintahan suatu wilayah

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi

tentang lembaga yang dituju dan dapat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi tersebut.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan, referensi, atau bahan perbandingan penelitian yang dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai perekonomian di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

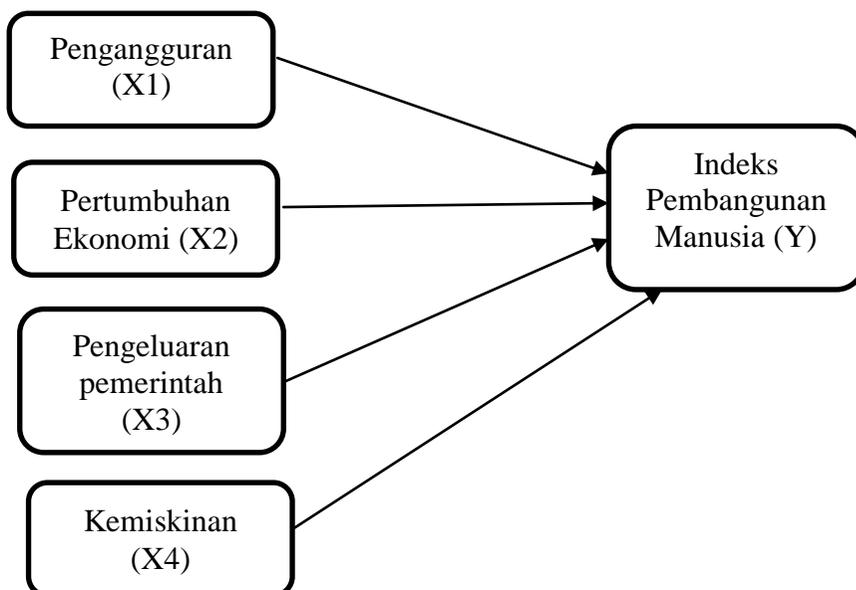
4. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi sivitas akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, Kerangka pemikiran yang tersusun adalah Indeks pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependennya. Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan sebagai variabel independennya



Gambar 1.1

Model Penelitian

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari

pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Selain indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan pengangguran di suatu Negara diharapkan juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha bekerja (mendapatkan atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.¹⁴ Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi

¹⁴Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro* (Banten: Baraka Aksara, 2013), 98.

pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan¹⁵

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan.

¹⁵Novita Dewi, Jurnal Ekonomi, *Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*, Vol.4, No.1,2017.

Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab I Pendahuluan, bab II. Kajian teoritis, bab III. Metode penulisan, bab IV. Pembahasan hasil penulisan, dan bab V. Kesimpulan dan saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian teoritis bab ini membahas tentang kajian pustaka yang akan membahas teori-teori meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Kemiskinan.

BAB III : Metode penelitian bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian.

BAB IV : Deskripsi hasil penelitian bab ini membahas uraian hasil penulisan berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

BAB V : Penutup bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang di teliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.